

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan sebuah upaya atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan sehingga menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan suatu negara. Salah satu filosofi negara Indonesia yang tertuang dalam sila kelima Pancasila yakni, “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” menjadi alarm kewajiban yang harus terpenuhi sehingga kesejahteraan rakyat terwujud. Indonesia sebagai negara berkembang untuk bisa menjadi negara maju memerlukan perjuangan yang terbilang tidak mudah membalikkan telapak tangan. Indonesia harus mampu membangun negara ini keluar dari zona negara berkembang dengan indikator kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Kesejahteraan rakyat ditandai oleh peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran sehingga tingkat kemiskinan mengalami penurunan dan tidak terjadinya kesenjangan sosial. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut dibutuhkan pembangunan ekonomi yang terus meningkat dan berada pada posisi stabil setiap tahunnya. Kehadiran pembangunan ekonomi menjadi titik terang bagi keberlangsungan kesejahteraan rakyat dan negara. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu

dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala daerah. Ada 3 (tiga) komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang disebabkan karena kenaikan barang dan jasa yang telah diproduksi oleh masyarakat. Dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai oleh suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat bagaimana kinerja perekonomian baik dalam skala nasional maupun daerah.

Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia selama 15 tahun terakhir terhitung mulai tahun 2005 sampai 2019 mengalami fluktuasi. Ini terlihat di tahun 2005 PDB sebesar 5,90 persen, tahun 2010 sebesar 6,1 persen hingga di tahun 2019 PDB hanya sebesar 5,02. Selama 15 tahun terakhir menggambarkan ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk.

Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari kerja. Pengangguran menandakan tidak adanya pendapatan yang diperoleh sehingga memicu terjadinya kemiskinan. Kemiskinan adalah

ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Tak bisa dipungkiri kemiskinan bukan hanya menjadi masalah nasional saja tetapi sudah menjadi problematika dunia. Tingkat kemiskinan yang tinggi berarti pengangguran juga merajalela yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Menurut 15 tahun terakhir dengan selang waktu 5 tahun yakni, di tahun 2005 jumlah pengangguran berada di angka 11,9 juta jiwa berselang 5 tahun berturut-turut setelahnya yaitu tahun 2010 terjadi penurunan dan berada di angka 8,3 juta jiwa, tahun 2014 turun di angka 7,2 juta jiwa, dan tahun 2019 kembali turun di angka 7,05 juta jiwa. Penurunan jumlah pengangguran ini jika dikaitkan dengan PDB mengalami perbedaan peningkatan dan penurunan. Di tahun 2010 terjadi peningkatan PDB 5,60 persen menjadi 6,1 persen dan penurunan angka pengangguran dari 11,9 juta jiwa menjadi 8,3 juta jiwa dibanding 5 tahun sebelumnya tahun 2005. Kemudian 5 tahun setelahnya yaitu tahun 2014 PDB turun menjadi 5,02 walaupun demikian angka pengangguran tetap turun di angka 7,2 juta jiwa, dan di tahun 2019 PDB tetap di angka 5,02 persen tetapi angka pengangguran menurun di angka 7,05 juta jiwa.

Pemecahan masalah pengangguran menjadi tanggungjawab pemerintah selaku pemangku kebijakan. Peran pemerintah sangatlah penting dalam mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah memiliki dua arah kebijakan. Pertama, kebijakan moneter berkaitan dengan jumlah uang beredar di masyarakat. Dan kedua, kebijakan fiskal berkaitan dengan bidang pengeluaran dan pendapatan. Kebijakan fiskal menjadi magnet bagi negara yang membantu menciptakan atau membuka kesempatan kerja sehingga

dapat mengurangi pengangguran, peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dan mencegah kemiskinan. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah akan menjadi pengeluaran pemerintah yang berarti bentuk dari kebijakan pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat diukur dari belanja rutin dan belanja pembangunan yang dianggarkan dalam APBN.

Pengeluaran pemerintah selama 15 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 sebesar 66,210,449,952.00 setelah 15 tahun kemudian meningkat menjadi 392,877,432,762.00 di tahun 2019. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi terjadi peningkatan di tahun 2010. PDB pada tahun 2010 meningkat sebesar 6,1 persen sejalan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah. Walaupun di tahun 2014 dan 2019 PDB di angka yang sama yaitu 5,2 persen tapi dengan pengeluaran pemerintah angka pengangguran juga terus mengalami penurunan jumlah. Pengeluaran pemerintah sangat berpengaruh bagi kelangsungan perekonomian. Kehadiran pemerintah menjadi jembatan bagi masyarakat dan pihak swasta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah menjadi solusi dari permasalahan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi bukan hanya dipengaruhi oleh pengangguran dan pengeluaran pemerintah. Jumlah penduduk juga ikut andil dalam proses pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk bisa menjadi faktor pembantu peningkatan perekonomian, semakin tinggi pertumbuhan penduduk maka angkatan kerja juga akan bertambah jika dibarengi dengan kualitas yang baik. Sebaliknya, pertumbuhan penduduk akan menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi pemicu meningkatnya angka pengangguran dan juga kemiskinan

jika angkatan kerja tidak memiliki kualitas yang baik. Pertumbuhan penduduk menjadi dilema dalam pertumbuhan ekonomi. Di negara-negara maju justru mengambil tindakan dengan menekan angka pertumbuhan penduduk yang dipercaya dapat menghambat perekonomian. Sedangkan negara berkembang masih kewalahan membatasi laju pertumbuhan penduduk.

Indonesia sebagai negara berkembang yang menduduki peringkat ke-IV penduduk terbanyak di dunia menjadi tantangan tersendiri dalam memecahkan atau memanfaatkan kondisi tersebut. Pertumbuhan penduduk di negara berkembang seperti Indonesia tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, karena memiliki karakteristik kurangnya modal, teknologi yang masih sederhana, tenaga kerja ahli yang kurang, dan tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan pertumbuhan penduduk dianggap sebagai penghambat dalam pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pemerintah dianggap belum maksimal dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat akan dianggap beban oleh pemerintah. Hal ini menjadi PR bagi pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tidak mengalami kemunduran dan menyebabkan semakin tingginya kesenjangan sosial. Jumlah penduduk yang semakin meningkat membawa akibat jumlah angkatan kerja yang semakin besar pula. Hal ini berarti semakin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah mengubah konsep dan kewenangan

daerah yang ada selama ini. Undang-undang ini memiliki makna substansial dalam pemberian kewenangan daerah yang semula ditujukan atas dasar porsi kebijakan pusat yang menonjol dalam pembagian kewenangan pusat-daerah selanjutnya diarahkan menjadi kemandirian daerah dalam mengelola kewasannya termasuk kebijakan-kebijakan pembiayaan. Artinya bahwa, setiap daerah dituntut untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Fenomena pertumbuhan ekonomi sejauh ini memberikan gambaran bahwa kesejahteraan masyarakat yang masih belum tercapai terutama dalam hal pendapatan dan tingginya angka pengangguran. Faktor-faktor yang berpengaruh diharapkan bisa bekerja sama dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang sudah menjadi mimpi buruk dalam perekonomian.

Campur tangan pemerintah menjadi hal yang tak bisa dipisahkan dalam perekonomian. Dalam perkembangan perekonomian, pemerintah yang hadir sebagai pemangku kebijakan memberi warna tersendiri bagi perjalanan perekonomian. Pemberian kewenangan kepada setiap pemerintah daerah diharapkan mampu memberi solusi dan memberikan wajah baru dalam perekonomian. Hal ini menjadi tantangan setiap pemerintah daerah tanpa terkecuali pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Harapan baru untuk wajah baru perekonomian yang lebih baik kini berada di pundak pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Pemberian kewenangan ini menjadikan pemerintah Kabupaten Luwu Utara berusaha harus dan mampu untuk mandiri dalam mengelola daerahnya.

**Tabel 1.1** Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha) di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2019

Tahun	Pengangguran (Ribu)	Pengeluaran Pemerintah (Milyar Rupiah)	Jumlah Penduduk (Ribu)	PDRB (Juta Rupiah)
2005	14.761	172,660,594,170.00	273.629	1,395,648.27
2006	7.920	291,645,167,975.00	276.454	1,601,070.49
2007	8.323	429,534,072,443.00	279.276	1,864,477.42
2008	6.674	437,611,754,098.00	282.092	3,356,111.7
2009	8.882	478,360,184,363.57	284.902	3,800,299.6
2010	6.399	213,979,113,353.00	287.472	4,255,587.7
2011	5.663	360,985,480,405.00	291.414	4,938,961.0
2012	6.440	349,741,141,150.00	292.765	5,560,283.5
2013	5.825	363,088,563,343.97	297.313	6,338,048.6
2014	2.459	456,301,563,747.31	299.989	7,590,616.6
2015	3.523	520,006,418,121.70	302.687	8,697,311.5
2016	-	656,749,313,085.89	305.372	9,776,941.9
2017	4.841	620,791,025,934.40	308.001	10,787,078.5
2018	5.291	636,884,283,013.73	310.470	11,999,256.5
2019	4.616	672,736,976,259.29	312.880	13,047,331.2

Sumber: BPS Luwu Utara 2020

Jumlah pengangguran Kabupaten Luwu Utara dalam kurun waktu 15 tahun selalu berada di bawah tingkat pengangguran provinsi. Pada tahun 2005 sampai dengan 2018 jumlah pengangguran mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006 secara jumlah mengalami penurunan. Tetapi, di tahun 2007 jumlah pengangguran kembali naik. Kondisi tahun 2005 sampai 2007 juga berulang di tahun 2007 sampai 2009. Sedangkan pada tahun 2009 hingga tahun 2011 jumlah pengangguran mengalami penurunan yaitu dari 8.882 menjadi 5.663 dan siklus ini kembali terulang di tahun

2012 sampai 2014. Pada tahun 2017 hingga 2018 jumlah pengangguran terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 jumlah pengangguran 2.459 adalah angka terkecil selama 15 tahun terakhir di Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 1.1 menampilkan total belanja daerah oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhitung mulai tahun 2016 sampai 2019 terus mengalami peningkatan. Peningkatan pengeluaran pemerintah menjadi salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jumlah penduduk pada tabel 1.1 untuk Kabupaten Luwu Utara juga mengalami fluktuatif. Pada tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Utara terus meningkat hingga di tahun 2019 yaitu dari 299.989 jiwa menjadi 312.880 jiwa. Jumlah penduduk yang kian bertambah 6 tahun terakhir akan berdampak pada bertambahnya angkatan kerja dan pengangguran dikhawatirkan naik tangga. Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah terutama dalam pembiayaan. Pengeluaran pemerintah dari dampak bertambahnya jumlah penduduk perlu penanganan dan keputusan yang tepat sehingga kekhawatiran dari dampak negatif yang ditimbulkan tidak terjangkit pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Utara.

Data perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Luwu Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan memberi gambaran pertumbuhan ekonomi mulai tahun 2010 hingga 2019. Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Luwu Utara (5,93 persen) berada di bawah Sulawesi Selatan (8,18 persen). Namun, di tahun 2014 hingga 2019 pertumbuhan ekonomi Luwu Utara mengalami peningkatan dan



berhasil berada di atas dari Sulawesi Selatan. Menurut data pengangguran, data pengeluaran pemerintah, data jumlah penduduk, dan data pertumbuhan ekonomi pada tabel 1.1 jika dianalisis maka terdapat hubungan saling mempengaruhi.

Pengangguran di tahun 2010 dan tahun 2014 mengalami penurunan, hal ini sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di tahun yang sama pada Kabupaten Luwu Utara. Sebaliknya, pada Provinsi Sulawesi Selatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2010 dan tahun 2014 mengalami kemunduran. Hal yang serupa terjadi pada pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Padahal, pengeluaran pemerintah dianggap sebagai solusi dari pertumbuhan ekonomi. Untuk persentase penduduk tahun 2010 dan 2014 mengalami penekanan persen dan berpengaruh signifikan dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara. Berbeda dengan Provinsi Sulawesi Selatan, walaupun persentase penduduk di tahun 2010 dan 2014 berhasil mengalami penurunan tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dilihat tahun 2010 pertumbuhan ekonomi menurun dari 8,18 persen menjadi 7,54 tahun 2014 persen.

Menurut data BPS Luwu Utara, selama periode tahun 2015-2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Utara mengalami pertumbuhan sebesar 6,67 persen (2015); 7,49 persen (2016); 7,60 persen (2017); 8,39 persen (2018); dan 7,11 persen (2019). Perekonomian Kabupaten Luwu Utara tahun 2015-2019 tetap tumbuh di atas 5 persen di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah. Kendati pun demikian, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 melambat, yakni dari 8,39 persen tahun 2018 menjadi 7,11 persen tahun 2019 dan berada di peringkat 9 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi

Sulawesi Selatan. Seiring dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara jumlah penduduk setiap tahunnya juga mengalami peningkatan selama periode tahun 2015-2019. Jumlah penduduk di tahun 2015 sebesar 302.687 jiwa hingga di tahun 2019 sebesar 312.880 jiwa. Akan tetapi, pemandangan berbeda pada pertumbuhan ekonomi yang melambat dari 8.39 persen tahun 2018 menjadi 7,11 persen tahun 2019 sedangkan pertumbuhan penduduk tetap meningkat setiap tahunnya. Di sisi lain, persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Utara cenderung mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan, persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Utara menempati peringkat 3 tertinggi dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dapat dikatakan bahwa pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara belum cukup membuahkan hasil.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat juga berpengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan yang juga berarti tingginya angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang melambat di tahun 2019. Pemerintah dalam hal ini dituntut untuk cepat tanggap memecahkan permasalahan yang ada. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai pemegang kebijakan diharapkan bisa memanfaatkan momentum kebijakan yang telah diberikan pemerintah pusat untuk bisa mengelola kawasannya dengan baik sehingga faktor-faktor pertumbuhan ekonomi dapat didorong untuk meningkatkan perekonomian dan tercipta kesejahteraan. Dari data yang ditampilkan BPS Luwu Utara memantik peneliti untuk diteliti lebih dalam apakah pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten Luwu Utara. Selain itu, terdapat perbedaan pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengangguran, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi sehingga menarik untuk diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Indrian Safitri dan Aliasuddin (2016) menyimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu penelitian yang dilakukan Devi Andriani, Nurmauliza (2018) menyimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian Christiawan Eka Arianto, Sonny Sumarsono, M. Adenan (2015) menyimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan penelitian Ichwan Fuady Falahinur (2017) menyimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Khilyati Zam Zam (2016) menyimpulkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil uraian permasalahan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan fenomena yang di atas, yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengangguran,

Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara?
2. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pengaruh Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi, serta menjadi literatur-literatur maupun penelitian di bidang Ekonomi Pembangunan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menjadi referensi, dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti yang akan datang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menambah pengetahuan yang berhubungan dengan Pengaruh Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi. selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk melatih kemampuan dalam berpikir kritis sekaligus menentukan solusi atas masalah di masa depan.

- b. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran dalam memanfaatkan analisis tentang sumber daya manusia

terutama dalam bidang perekonomian. Dan juga dapat digunakan sebagai perbaikan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dalam definisi yang lain, dijelaskan pertumbuhan ekonomi merupakan terjadinya perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa produksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2004). Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Menurut Kuznet (Jhingan, 2001) pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk mengadakan banyak jenis barang-barang ekonomi kepada para penduduknya. Kemampuan ini lahir sesuai dengan adanya kemajuan teknologi serta penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

##### **2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Teori Keynes adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonomi Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu

ekonomi campuran, yang mana negara dan sektor swasta keduanya memegang peranan penting yang tidak bisa dipisahkan. Teori ini menyatakan bahwa trend ekonomi makro dapat memengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama ketika perekonomian mengalami kemerosotan.

Keynes berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, sebagai salah solusi untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya yang kemudian hal ini akan berpengaruh pada bertambahnya permintaan agregat. Hal ini pula akan berdampak pada meningkatnya tabungan sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi dan perekonomian akan berada di kondisi normal.

### **2.1.2 Pengangguran**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan.



### **2.1.2.1 Cara Menghitung Pengangguran**

Perbandingan antara jumlah angkatan kerja bagi yang menganggur dengan angkatan kerja keseluruhannya disebut tingkat pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

### **2.1.2.2 Teori Pengangguran**

Teori Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung tumbuh secara deret ukur sehingga melampaui pertumbuhan makanan yang cenderung tumbuh secara deret hitung. Dari uraian tersebut, Malthus menyimpulkan bahwa kuantitas manusia akan terjerumus ke dalam kemiskinan kelaparan.

Teori Malthus jika ditelaah lebih dalam yang menyatakan penduduk cenderung tumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan. Hal ini berakibat pada timbulnya persaingan sesama manusia dalam mencari makanan demi keberlangsungan hidupnya. Persaingan ini akan menimbulkan tersisihnya sebagian manusia serta sulitnya melangsungkan hidup. Pada masyarakat modern diartikan bahwa jumlah penduduk yang semakin pesat akan berpengaruh pada penambahan tenaga kerja. Namun hal ini, tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang terbatas. Hal inilah yang menjadi faktor persaingan yang terjadi sesama manusia dalam memperoleh pekerjaan. Artinya bahwa, sebagian manusia yang tersisih atau yang tidak mampu bersaing memperoleh pekerjaan maka tergolong ke dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau disebut pengangguran.

### **2.1.3 Pengeluaran Pemerintah**

#### **2.1.3.1 Teori Pengeluaran Pemerintah Keynes**

Pendapatan Nasional dirumuskan sebagai  $Y = C + I + G + X - M$  yang kemudian dijadikan sebagai acuan utama kaum Keynesian dalam menjelaskan teori yang mengaitkan peran pemerintah di dalam perekonomian. Berdasar pada acuan tersebut, terlihat bahwa kenaikan (penurunan) pengeluaran pemerintah akan berefek pada menaikkan (menurunkan) pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dalam hal ini adalah salah satu dari unsur permintaan agregat. Formula  $Y = C + I + G + X - M$  dikenal sebagai identitas dari pendapatan nasional karena perhitungan pendapatan nasional yang diterapkan dilakukan dengan pendekatan pengeluaran. Y pada formula di atas mewakili pendapatan nasional sekaligus dapat berupa penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel yang berada pada sisi kanan formula tersebut disebut sebagai permintaan agregat. G merupakan variabel yang melambangkan pengeluaran pemerintah. Maka jika ingin melihat kontribusi pengeluaran pemerintah dalam menguatkan pendapatan nasional maka dapat dilakukan dengan membandingkan nilai G terhadap nilai Y dengan melakukan pengamatan dari waktu ke waktu (Dumairy, 1996).

#### **2.1.4 Kependudukan**

Berdasarkan UUD 1945 pasal 26 ayat 2 Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pengertian penduduk dalam ilmu sosiologi, penduduk adalah suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang

yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di suatu daerah. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area dimana mereka tinggal.

Menurut Badan Pusat Statistika (2014) penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penjabaran dari pembahasan mengenai kependudukan ini mencakup jumlah, umur, struktur, persebaran, mobilitas, dan kualitas serta ketahanannya yang berkaitan dengan sektor politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

Kualitas dalam kependudukan adalah kondisi dimana penduduk dinilai dari aspek fisik dan juga non fisik yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, produktifitas, kecerdasan, kemandirian, sebagai alat ukur standar yang mendasar untuk mengembangkan kemampuan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, beradab, berbangsa, dan hidup secara layak di negeri sendiri.

#### **2.1.4.1 Teori-teori Kependudukan**

Menurut Sukirno (2006:100) yang mengutip pendapat Nelson dan Leibstein mengemukakan bahwa terdapat pengaruh langsung antara penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta

meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk yang terlalu banyak atau kepadatan penduduk yang terlalu tinggi akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang.

Jhingan (2003: 214) mengemukakan bahwa pendapatan perkapita yang rendah dan tingkat pembentukan modal yang rendah semakin sulit bagi negara berkembang untuk menopang ledakan jumlah penduduk, sekalipun output meningkat sebagai hasil teknologi yang lebih baik dan pembentukan modal, peningkatan ini akan ditelan oleh jumlah penduduk yang terlalu banyak, alhasil tidak ada perbaikan dalam laju perbaikan nyata perekonomian.

Teori siklus populasi kemiskinan merupakan argumen utama dari para ekonom yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk secara cepat menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi yang merugikan. Menurut teori Malthus (dalam Todaro dan Smith, 2004: 242) mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara akan menyebabkan terjadinya kemiskinan kronis, selanjutnya Malthus melukiskan suatu kecenderungan universal bahwa jumlah populasi di suatu negara akan meningkat sangat cepat menurut deret ukur. Sementara itu, karena adanya proses penambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap, yaitu tanah, maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung, karena pertumbuhan pengadaan pangan tidak dapat berpacu secara mamadai atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk, sehingga pendapatan perkapita (dalam masyarakat agraris, pendapatan perkapita diartikan sebagai produksi pangan perkapita) cenderung terus mengalami penurunan sampai sedemikian rendahnya

sehingga segenap populasi harus bertahan pada kondisi sedikit di atas tingkat subsisten.

Hubungan jumlah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh positif dan dapat juga berpengaruh negatif. Hal ini dilihat dari aspek kualitas pertumbuhan penduduk yang mana pertumbuhan penduduk yang berakibat positif apabila pertumbuhannya dapat mendorong pembangunan ekonomi, artinya kenaikan jumlah penduduk dapat memungkinkan bertambahnya tenaga kerja yang mampu mendorong sektor produksi untuk meningkatkan kegiatan perekonomian. Sedangkan pertumbuhan penduduk dapat berakibat negatif apabila pertumbuhannya dapat menghambat pembangunan ekonomi, artinya penambahan penduduk tidak dapat meningkatkan produksi sehingga dapat menurunkan kebutuhan konsumsi hasil-hasil produksi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang baik adalah jika pertumbuhan penduduk lebih kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi.

Meskipun terdapat pertentangan mengenai konsekuensi positif dan negatif yang ditimbulkan oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk, namun selama beberapa dekade mulai muncul gagasan baru yang dikemukakan oleh Robert Cassen dalam Todaro (2006) sebagai berikut:

- a) Persoalan kependudukan tidak semata-mata menyangkut jumlah akan tetapi juga meliputi kualitas hidup dan kesejahteraan materiil.
- b) Pertumbuhan penduduk yang cepat memang mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Laju pertumbuhan penduduk yang terlampaui cepat meskipun memang bukan

merupakan penyebab utama dari keterbelakangan, harus disadari bahwa hal tersebut merupakan salah satu faktor yang penting penyebab keterbelakangan banyak negara.

- c) Pertumbuhan penduduk yang cepat menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi yang merugikan dan hal itu merupakan masalah yang utama harus dihadapi negara-negara dunia. Mereka kemudian mengatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat mendorong timbulnya berbagai macam masalah ekonomi, sosial, dan psikologis yang melatarbelakangi kondisi keterbelakangan yang menjerat negara-negara berkembang.

Pertumbuhan penduduk juga menghalangi prospek tercapainya kehidupan yang lebih baik karena mengurangi tabungan rumah tangga dan juga negara. Di samping itu, jumlah penduduk yang terlampau besar akan menguras kas pemerintah yang sudah sangat terbatas untuk menyediakan berbagai pelayanan kesehatan, ekonomi, dan sosial bagi generasi baru. Melonjaknya beban pembiayaan atas anggaran pemerintah tersebut jelas akan mengurangi kemungkinan dan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup generasi dan mendorong terjadinya transfer kemiskinan kepada generasi mendatang yang berasal dari keluarga berpenghasilan menengah ke bawah (Toda, 2006).

## **2.1.5 Hubungan antara Variabel**

### **2.1.5.1 Hubungan Pengangguran dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Pengangguran berhubungan dengan ketersediaan lapangan kerja dan kesediaan lapangan kerja berhubungan dengan investasi. Investasi diperoleh dari

akumulasi tabungan. Tabungan adalah sisa dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Semakin tinggi pendapatan nasional maka akan membuka kesempatan baru untuk melakukan kapasitas produksi baru yang akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja baru. Pendapatan nasional yang tinggi tercermin dari tingginya pendapatan perkapita.

Hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dengan teori Okun's law yang menyatakan adanya pengaruh empiris antara pengangguran dengan output dalam siklus bisnis. Hasil studi empirisnya menunjukkan bahwa penambahan 1 (satu) poin pengangguran akan mengurangi GDP sebesar 2 persen. Ini berarti terdapat pengaruh yang negatif antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dan juga sebaliknya pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Baeti (2013) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **2.1.5.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Pengeluaran pemerintah sebagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi perekonomian daerah. Pengeluaran pemerintah meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk perekonomian dalam suatu periode tertentu. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah dan pengeluaran pembangunan atau belanja pelayanan publik.

Pengeluaran pemerintah dipercaya sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pihak swasta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Nasional dirumuskan sebagai  $Y = C + I + G + X - M$  yang kemudian dijadikan sebagai acuan utama kaum Keynesian dalam menjelaskan teori yang mengaitkan peran pemerintah di dalam perekonomian. Berdasar pada acuan tersebut, terlihat bahwa kenaikan (penurunan) pengeluaran pemerintah akan berefek pada menaikkan (menurunkan) pendapatan nasional. Hal serupa penelitian yang dilakukan oleh Aziz Septiani, dkk (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dian Fristia Alfiyanto (2014) hasil penelitiannya membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto.

### **2.1.5.3 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi gejala pendapat bagi para ahli. Jumlah penduduk yang tinggi bisa menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan juga menjadi poin positif bagi pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang tinggi sebisanya membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasarkan pada semakin tinggi jumlah penduduk maka tenaga kerja juga akan bertambah yang bisa memicu peningkatan pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat jika tenaga kerja memiliki kualitas yang baik.

Adam Smith melihat bahwa adanya penambahan penduduk akan berdampak pada meluasnya pasar serta mendorong spesialisasi sehingga akan



mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian. Munculnya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas pekerja dan mendorong kemajuan teknologi hingga pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indrian Safitri dan Aliasuddin (2016) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun & Judul Penelitian	Metode Penelitian & Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Indrian Safitri, Aliasuddin, 2016). Pengaruh Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Metode: Kuantitatif Variabel: angka lamanya bersekolah (X1); jumlah penduduk (X2); angka partisipasi sekolah (X3); pertumbuhan ekonomi (Y).	Hasil penelitian menunjukkan: (1) angka lamanya bersekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) angka partisipasi sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2	(Nur Baeti, 2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran	Metode: Kuantitatif Variabel: pengangguran (X1); pertumbuhan ekonomi (X2); pengeluaran pemerintah (X3);	Hasil penelitian menunjukkan: (1) pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, (2)

	Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011	pembangunan manusia (Y).	pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, (3) pengeluaran pemerintah khususnya sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia,
3	(Aziz Septiani, Mawardi, M. Ade Khairur Rizki, 2016). Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Metode: Kuantitatif Variabel: inflasi (X1); pengangguran (X2); pertumbuhan ekonomi (Y).	Hasil penelitian menunjukkan: (1) inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4	(Muhammad Nur Afiat, 2015). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Perubahan Struktur Ekonomi di Provinsi	Metode: Kuantitatif Variabel: pengeluaran pemerintah (X1); perubahan struktur ekonomi (Y).	Hasil penelitian menunjukkan: pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap perubahan struktur ekonomi.

	Sulawesi Tenggara.		
5	(Devi Andriani, Nurmauliza, 2018). Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007-2016.	Metode: Kuantitatif Variabel: pengangguran (X1); pengeluaran pemerintah (X2); pertumbuhan ekonomi (Y).	Hasil penelitian menunjukkan: (1) pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
6	(Eka Agustina, Mohd. Nur Syechalad, Abubakar Hamzah, 2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, tingkat Pengangguran dan Tingkat pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.	Metode: Kuantitatif Variabel: jumlah penduduk (X1); tingkat pengangguran (X2); tingkat pendidikan (X3); kemiskinan (Y).	Hasil penelitian menunjukkan: (1) jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, (2) tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, (3) tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
7	(Rahmatullah, 2015). Pengaruh	Metode: Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan: (1) penduduk

	Penduduk Umur Produktif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Variabel: penduduk umur produktif (X1); investasi swasta (X2); pertumbuhan ekonomi (Y)	umur produktif berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) investasi swasta berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
8	(Dian Fristia Alfiyanto, 2014). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Grobogan Tahun 1990-2012	Metode: Kuantitatif Variabel: jumlah penduduk (X1); tenaga kerja (X2); tingkat pendidikan (X3); pengeluaran pemerintah (X4); produk domestik regional bruto (PDRB) (Y).	Hasil penelitian menunjukkan: (1) jumlah penduduk, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto berdasarkan hasil uji t, (2) jumlah penduduk, tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan pengeluaran pemerintah secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto berdasar hasil uji F.
9	(Christiawan Eka Arianto, Sonny Sumarsono, M.	Metode: Kuantitatif Variabel: jumlah penduduk (X1);	Hasil penelitian menunjukkan: (1) jumlah penduduk berpengaruh

	Adenan, 2015). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Angka Pengangguran terhadap Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember.	pengangguran (X2); pertumbuhan ekonomi (Y).	positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) pengangguran berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
10	(Eka Nur Hidayah, 2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Daya Tarik Wisata, Tenaga kerja dan UMK terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.	Metode: Kuantitatif Variabel: jumlah penduduk (X1); indeks pembangunan manusia (X2); daya tarik wisata (X3); tenaga kerja (X4); UMK (X5); pertumbuhan ekonomi (Y).	Hasil penelitian menunjukkan: (1) jumlah penduduk, daya tarik wisata, tenaga kerja, dan UMK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
11	(Ichwan Fuady Falahinur, 2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran	Metode: Kuantitatif Variabel: tingkat pendidikan (X1); jumlah penduduk (X2); pengeluaran pemerintah (X3);	Hasil penelitian menunjukkan: (1) tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB), (2) jumlah penduduk

	Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (studi kasus di kabupaten Kulonprogo tahun 1987-2016)	pertumbuhan ekonomi (Y).	berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB), (3) pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).
12	(Ulfatul Karomah, 2017). Pertumbuhan ekonomi Dipengaruhi Pengeluaran Pemerintah dan Dana Alokasi Umum (studi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat dan Banten).	Metode: Kuantitatif Variabel: tingkat pendidikan (X1); jumlah penduduk (X2); pengeluaran pemerintah (X3); pertumbuhan ekonomi (Y).	Hasil penelitian menunjukkan: (1) pengeluaran pemerintah diukur melalui belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
13	(Khilyati Zam Zam, 2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Jumlah	Metode: Kuantitatif Variabel: pengeluaran pemerintah (X1); pendapatan asli daerah (X2); jumlah angkatan kerja (X3); jumlah penduduk (X4);	Hasil penelitian menunjukkan: (1) pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) pendapatan asli daerah

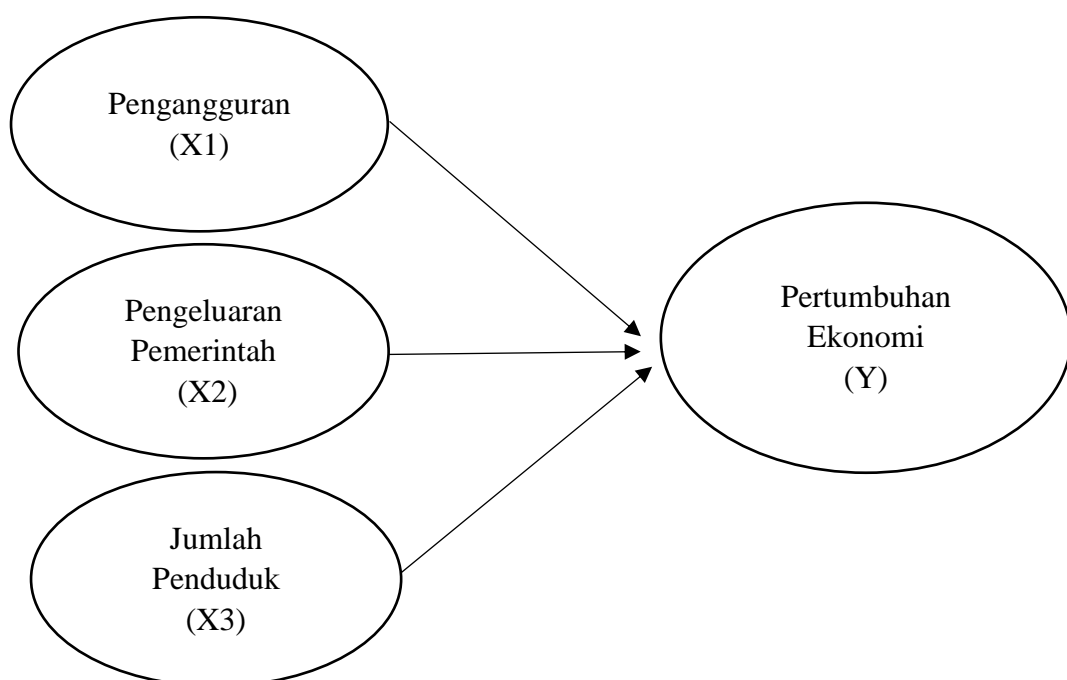
	Angkatan Kerja, dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Solo Raya Periode 2000-2014.	pertumbuhan ekonomi (Y).	berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) jumlah angkata kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (4) jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
14	(Kuswati Indra Rahayu, Michael, Siti Amalia, 2017). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi serta Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi (studi pada provinsi Kalimantan Timur).	Metode: Kuantitatif Variabel: jumlah penduduk (X1); inflasi (X2); investasi swasta (X3); pertumbuhan ekonomi (Y).	Hasil penelitian menunjukkan: (1) jumlah penduduk secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) inflasi secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) investasi swasta secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
15	(Edi Setyawan, 2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor	Metode: Kuantitatif Variabel: pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan (X1); pengeluaran pemerintah di sektor	Hasil penelitian menunjukkan: (1) pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, (2)

Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian terhadap Pertumbuhan ekonomi Indonesia Periode 1970-2015.	kesehatan (X2); pengeluaran pemerintah di sektor pertanian (X3); pertumbuhan ekonomi (Y).	pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) pengeluaran pemerintah di sektor pertanian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
--	---	--

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah pengaruh pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk sebagai variabel independen (X) terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen (Y) di kabupaten Luwu Utara. dalam penelitian ini dapat dijelaskan atau digambarkan bagaimana hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

**Gambar 2.1** Kerangka Konseptual





## 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pendapat sementara dari suatu penelitian serta sebagai pedoman dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori terkait hipotesis yang selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, hipotesisnya sebagai berikut:

**H1** Diduga bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.

**H2** Diduga bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.

**H3** Diduga bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Masamba Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan alokasi waktu kurang lebih sekitar 3 bulan.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data berbentuk angka atau bilangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari obyek penelitian, yaitu data pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan jumlah penduduk yang berasal dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Utara, kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Luwu Utara, dan data-data jurnal, buku, internet atau melalui dokumentasi bertujuan untuk mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dan mendukung penelitian.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini yaitu keseluruhan data tentang pengangguran, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara tahun 2005-2019.

Sampel dalam penelitian ini adalah data pengangguran, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara. Data yang digunakan mulai tahun 2005-2019.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan dapat dilakukan baik secara *library reseach* maupun *internet reseach*. Teknik ini dilakukan untuk menambah wawasan dan informasi tentang masalah yang akan diteliti dengan maksud pelaksanaan untuk memperoleh data-data pendukung yang berfungsi sebagai tujuan pustaka yang dapat mendukung data-data yang diperoleh dari obyek penelitian. Selain itu, juga sebagai referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

#### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lian antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan lisan melalui dialog langsung antara peneliti dengan para informan.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Menurut Algifari (2000), regresi linear berganda mengandung makna bahwa dalam suatu persamaan regresi terdapat satu variabel dependent dan

lebih dari satu variabel independent. Berdasarkan spesifikasi model regresi maka model persamaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Persamaan Regresi Linear Berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Pertumbuhan ekonomi

X<sub>1</sub> : Pengangguran

X<sub>2</sub> : Pengeluaran Pemerintah

X<sub>3</sub> : Jumlah Penduduk

a : Konstanta

b : Koefisien regresi

e : Error

### 3.6 Uji Hipotesis

#### 1. Uji Signifikasi

Analisis determinasi ( $R^2$ ) bertujuan menunjukkan besarnya perubahan yang tersaji diakibatkan oleh variabel lainnya. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur presentase besarnya keterkaitan antara variabel-variabel independent (X) yaitu pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk terhadap variabel dependent (Y) yaitu pertumbuhan ekonomi. Koefisien ini nilainya antara 0 – 1. Koefisien determinasi dinyatakan dalam  $R^2$  dan variabel bebas yang lebih dari satu variabel maka menggunakan adjusted ( $R^2$ ).

## 2. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian regresi secara parsial (uji t) untuk menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent yang dapat dilihat dengan membandingkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel.

### 3.7 Definisi Operasional

Variabel	Uraian	Tolak Ukur
Pertumbuhan Ekonomi	Proses kondisi perekonomian Luwu Utara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.	1) PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha
Pengangguran	Penduduk Kabupaten Luwu Utara kategori angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan atau belum bekerja.	1) Angkatan kerja yang tidak bekerja
Pengeluaran Pemerintah	Kebijakan pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang menjadi benang merah bagi masyarakat dan juga pihak swasta. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai pengelola kebijakan berperan penting dalam peningkatan perekonomian Kabupaten Luwu Utara.	1) Belanja pegawai 2) Belanja barang dan jasa 3) Belanja modal
Jumlah Penduduk	Total keseluruhan penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu faktor penting di Kabupaten Luwu Utara	1) Jumlah Penduduk

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **4.1.1.1 Kabupaten Luwu Utara**

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibukota Kabupaten Luwu Utara terletak di Masamba. Secara astronomis, Luwu Utara terletak antara 010 53'19" – 020 55'36" Lintang Selatan dan 1190 47'46" – 1200 37'44" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Luwu Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah di sebelah utara, berbatasan dengan Sulawesi Barat dan Toraja di sebelah barat, dan berbatasan dengan Luwu dan Teluk Bone di sebelah selatan. Kabupaten Luwu Utara terbentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 dengan Ibukota Masamba adalah merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu dengan luas 14.447,56 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 442.472 jiwa dan setelah pemekaran tersebut Kabupaten Luwu Utara saat ini memiliki luas wilayah 7,502.58 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 312.880 jiwa.

Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 15 kecamatan yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) wilayah berdasarkan topografinya yaitu wilayah dataran rendah sebanyak 9 kecamatan dengan ketinggian 15 – 70 meter di atas permukaan laut dan dataran tinggi sebanyak 3 kecamatan dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 010 53'19" – 020 55'36" Lintang Selatan dan 1190 47'46" – 1200 37'44" Bujur Timur.

Wilayah administrasi Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 12 wilayah kecamatan dengan luas masing-masing yaitu: Sabbang (525.08 km<sup>2</sup>), Baebunta (295.25 km<sup>2</sup>), Malangke (229.70 km<sup>2</sup>), Malangke Barat (214.05 km<sup>2</sup>), Sukamaju (255.48 km<sup>2</sup>), Bone-bone (127.92 km<sup>2</sup>), Tanalili (149.41 km<sup>2</sup>), Masamba (1,068.85 km<sup>2</sup>), Mappedeceng (275.50 km<sup>2</sup>), Rampi (1,565.65 km<sup>2</sup>), Rongkong (686.50 km<sup>2</sup>), Seko (2,109.19 km<sup>2</sup>). Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara kemudian dibagi lagi menjadi sebanyak 174 desa/kelurahan/UPT.

Penduduk Kabupaten Luwu Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 312 ribu jiwa yang terdiri atas 156.878 jiwa penduduk laki-laki dan 156.005 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018 silam, penduduk Luwu Utara mengalami pertumbuhan sebesar 0,78 persen. Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,56. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 mencapai 41,85 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Sukamaju Selatan sebesar 338 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Rampi sebesar hampir 2 jiwa/km<sup>2</sup>.

#### **4.1.1.2 Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara**

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU No. 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU No. 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut

ditetapkan UU NO 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan di bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Dalam UU No. 16 Tahun 1997 memuat materi, antara lain:

1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya yang terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
4. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Peranan yang harus dijalankan oleh BPS berdasarkan UU No. 16 Tahun 1997 adalah:

1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.



2. Membantu kegiatan statistik di kementerian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
4. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara.

Visi Badan Pusat Statistik adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk sema”.

Misi Badan Pusat Statistik yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegritasi dan berstandar nasional maupun internasional.
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

#### **4.1.1.3 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Badan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan peralatan.
5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
6. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dengan mempertimbangkan strategi yang ada, maka visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Beorientasi Publik”

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di atas mengandung makna yaitu:

1. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Utara yang transparan, yang berarti pengelolaan keuangan yang mana aturan dan alasan dibalik langkah-langkah bersifat jelas dan terbuka disertai ketersediaan informasi yang lengkap.
2. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Utara yang akuntabel, yang berarti pengelolaan keuangan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya dan disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
3. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Utara berorientasi publik adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam hal ini penganggaran yang berpihak kepada masyarakat, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Penjabaran misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah beserta tujuan, sasaran dan indikator untuk mewujudkan misi tersebut:

1. Mewujudkan penatausahaan dan pengelolaan kas keuangan daerah yang efektif, efisien, dan optimal.
2. Memacu pengelolaan APBD yang berkualitas, berorientasi publik, berkelanjutan, dan berkeadilan.
3. Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
4. Penyajian informasi keuangan daerah melalui laporan keuangan pemerintah daerah yang akurat, komprehensif, dan akuntabel.

5. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

#### 4.1.2 Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara

Pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini diukur menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Utara dari tahun 2005-2019.

**Tabel 4.1** Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2019

Tahun	PDRB	Pertumbuhan Ekonomi
2004	1,210,580.50	-
2005	1,395,648.27	15.29
2006	1,601,070.49	14.72
2007	1,864,477.42	16.45
2008	3,356,111.70	80.00
2009	3,800,299.60	13.24
2010	4,255,587.70	11.98
2011	4,938,961.00	16.05
2012	5,560,283.50	12.58
2013	6,338,048.60	13.98
2014	7,590,616.60	19.76
2015	8,697,311.50	14.58
2016	9,776,941.90	12.41
2017	10,787,078.50	10.33
2018	11,999,256.50	11.24
2019	13,047,331.20	8.73

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Utara 2020

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha pada tabel 4.1 secara umum terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun, untuk tingkat

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Utara justru mengalami fluktuatif yaitu tahun 2015-2018 tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat tiap tahunnya dari 6,67 persen hingga berada di puncak 8,39 persen tetapi di tahun 2019 turun menjadi 7,11 persen. Kendati pun demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Utara tetap berada di atas tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Hal ini menjadikan Kabupaten Luwu Utara masuk tiga besar tertinggi untuk pertumbuhan ekonomi se-Sulawesi Selatan.

#### **4.1.3 Deskripsi Pengangguran di Kabupaten Luwu Utara**

Pengangguran dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan data jumlah pengangguran dalam satuan jiwa mulai tahun 2005 hingga tahun 2019. Data tersebut digunakan untuk melihat apakah pengangguran memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 4.2 di bawah menampilkan data jumlah pengangguran di Kabupaten Luwu Utara mengalami fluktuatif dari tahun 2005-2019. Tahun 2005 menjadi puncak tertinggi angka jumlah pengangguran di Kabupaten Luwu Utara yaitu sebesar 14.761 jiwa. Berbanding terbalik, di tahun 2014 pengangguran berada di titik terendah yaitu 2.459 jiwa. Akan tetapi, secara umum pengangguran mengalami penurunan di tengah semakin bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Pengangguran menjadi permasalahan yang tidak berujung, hal ini dikarenakan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat sedang kuota terbatas untuk ketersediaan lapangan pekerjaan dibandingkan jumlah tenaga kerja.

**Tabel 4.2** Pengangguran di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2019

Tahun	Pengangguran	Persentase
2004	16.684	-
2005	14.761	-11.53
2006	7.920	-46.35
2007	8.323	5.09
2008	6.674	-19.81
2009	8.882	33.08
2010	6.399	-27.95
2011	5.663	-11.50
2012	6.440	13.72
2013	5.825	-9.55
2014	2.459	-57.78
2015	3.523	43.27
2016	-	-
2017	4.841	37.41
2018	5.291	9.29
2019	4.616	-12.75

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Utara 2020

#### 4.1.4 Deskripsi Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Luwu Utara

Data pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah Kabupaten Luwu Utara tahun 2005-2019. Data pengeluaran pemerintah diperoleh dari 3 sumber yaitu data belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kemudian, data tersebut digunakan untuk mengukur apakah benar adanya pengeluaran pemerintah dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.

**Tabel 4.3** Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2019

Tahun	Pengeluaran Pemerintah	Persentase
2004	166,051,883,490.00	-
2005	172,660,594,170.00	3.98
2006	291,645,167,975.00	68.91
2007	429,534,072,443.00	47.28
2008	437,611,754,098.00	1.88
2009	478,360,184,363,57	9.31
2010	213,979,113,353.00	-55.27
2011	360,985,480,405.00	68.70
2012	349,741,141,150.00	-3.11
2013	363,088,563,343.97	3.82
2014	456,301,563,747.31	25.67
2015	520,006,418,121.70	13.96
2016	656,749,313,085.89	26.29
2017	620,791,025,934.40	-5.48
2018	636,884,283,013.73	2.59
2019	672,736,976,259.29	5.63

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Utara 2020

Pengeluaran pemerintah pada tabel 4.3 di atas mengalami fluktuatif. Namun, tahun 2012 hingga tahun 2016 pengeluaran pemerintah terus meningkat. Berbeda tahun 2017 yang kembali mengalami penurunan akan tetap dua tahun setelahnya pengeluaran pemerintah kembali meningkat.

#### 4.1.5 Deskripsi Jumlah Penduduk di Kabupaten Luwu Utara

Data Jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara dari tahun 2005 hingga 2019 dalam satuan jiwa. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang keluarga berencana rupanya

berbanding terbalik dengan keyakinan sebagian masyarakat yang percaya bahwa jumlah anak akan memberikan rezeki yang lebih. Selain itu, keterbatasan ekonomi juga menjadi pemicu sebagian masyarakat menengah ke bawah tidak bisa menekan angka kelahiran. Dari data jumlah penduduk dapat dilihat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.

**Tabel 4.4** Jumlah Penduduk di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2019

Tahun	Jumlah Penduduk	Persentase
2004	267.779	-
2005	273.629	2.18
2006	276.454	1.03
2007	279.276	1.02
2008	282.092	1.00
2009	284.902	0.99
2010	287.472	0.90
2011	291.414	1.37
2012	292.765	0.46
2013	297.313	1.55
2014	299.989	0.90
2015	302.687	0.89
2016	305.372	0.88
2017	308.001	0.86
2018	310.470	0.80
2019	312.880	0.77

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Utara 2020

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara pada tabel 4.4 terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk terus meningkat. Angka terendah berada di tahun 2005 yaitu 273.629 jiwa dan angka tertinggi berada di tahun 2019 yaitu 312.880.



besarnya jumlah penduduk menjadi pertanda bertambahnya jumlah angkatan kerja sedang lapangan kerja terbatas.

#### 4.2 Metode Regresi Linear Berganda

Pengujian regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dapat melalui suatu persamaan regresi linear berganda.

**Tabel 4.5** Regresi Linear Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	-191.437	15.491
Pengangguran	-.001	.019
Pengeluaran Pemerintah	-.008	.160
Jumlah Penduduk	16.452	1.453

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber: Output SPSS.2020

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa persamaan regresi linear berganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = -191.437 - 0.001X_1 - 0.008X_2 + 16.452X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat di atas dapat diketahui hal-hal berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -191.437 dapat diartikan bahwa apabila variabel bebas dianggap konstan (Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk = 0), maka PDRB akan turun sebesar -191.437 persen.

2. Koefisien regresi Pengangguran (X1) sebesar -0.001 menggambarkan bahwa apabila variabel Pengangguran (X1) meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan, maka PDRB di Kabupaten Luwu Utara berkurang sebesar 0.001 persen.
3. Koefisien regresi Pengeluaran Pemerintah (X2) sebesar -0.008 menggambarkan bahwa apabila variabel Pengeluaran Pemerintah (X2) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan, maka PDRB di Kabupaten Luwu Utara berkurang sebesar 0.008 persen.
4. Koefisien regresi Jumlah Penduduk (X3) sebesar 16.452 menggambarkan bahwa apabila variabel Jumlah Penduduk (X3) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan, maka PDRB di Kabupaten Luwu Utara meningkat sebesar 16.452 persen.

### **4.3 Pengujian Hipotesis**

#### **4.3.1 Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Analisis ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Dalam hal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen yaitu pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk.

**Tabel 4.6** Regresi Linear Berganda**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.983 <sup>a</sup>	.967	.957	.15031

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah

Sumber: Output SPSS.2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0.983 atau 98.3 %. Hal ini berarti hubungan atau korelasi antara pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk terhadap PDRB dapat dikatakan sangat baik karena memiliki nilai koefisien korelasi di atas 0,5. Koefisien *adjusted R square* adalah sebesar 0.957 atau 95.7 %. Maka variabel dependen yaitu PDRB (Y) dipengaruhi oleh variabel pengangguran (X1), pengeluaran pemerintah (X2), dan jumlah penduduk (X3) dengan nilai sebesar 95.7 %. Sedangkan sisanya sebesar  $100\% - 95.7\% = 4.3\%$  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

#### 4.3.2 Uji Parsial (Uji t)

Pengujian regresi secara parsial bertujuan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial (terpisah) terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dengan membandingkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0.05. Berikut cara menilai signifikan atau tidak dari variabel independen terhadap variabel dependen:

1. Jika nilai signifikansi  $< 0.05$  atau nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel maka variabel independen tersebut berpengaruh pada variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi  $> 0.05$  atau nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel maka variabel independen tersebut tidak berpengaruh pada variabel dependen.

Cara menghitung derajat kebebasan (*degree of freedom*) yaitu:

$$df = n - k - 1$$

$$df = 15 - 3 - 1$$

$$df = 11$$

Hasil dari perhitungan tersebut diperoleh  $t$  tabel sebesar 2,20099. Berikut data hasil uji parsial:

**Tabel 4.7** Regresi Linear Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-191.437	15.491		-12.358	.000
Pengangguran	-.001	.019	-.003	-.052	.960
Pengeluaran Pemerintah	-.008	.160	-.005	-.052	.960
Jumlah Penduduk	16.452	1.453	.985	11.322	.000

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber: Output SPSS.2020

Hasil yang ditunjukkan dari tabel di atas adalah bagaimana hubungan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama menunjukkan variabel Pengangguran (X1) mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.960. Hal ini mengindikasikan bahwa H1 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pengangguran (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB (Y) karena tingkat signifikansi variabel pengangguran lebih besar dari 0.05. Hal ini diperkuat dari hasil perbandingan t hitung dan t tabel, yang mana t hitung lebih kecil dari t tabel ( $0.52 < 2.20099$ )
2. Hipotesis kedua menunjukkan variabel Pengeluaran Pemerintah (X2) mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.960. Hal ini mengindikasikan bahwa H2 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB (Y) karena tingkat signifikansi variabel pengeluaran pemerintah lebih besar dari 0.05. Hal ini diperkuat dari hasil perbandingan t hitung dan t tabel, yang mana t hitung lebih kecil dari t tabel ( $0.52 < 2.20099$ )
3. Hipotesis ketiga menunjukkan variabel Jumlah Penduduk (X3) mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.000. Hal ini mengindikasikan bahwa H3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Jumlah Penduduk (X3) berpengaruh signifikan terhadap PDRB (Y) karena tingkat signifikansi variabel jumlah penduduk lebih kecil dari 0.05. Hal ini diperkuat dari hasil perbandingan t hitung dan t tabel, yang mana t hitung lebih besar dari t tabel ( $11.322 < 2.20099$ ).

#### **4.4 Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

##### **4.4.1 Pengaruh Pengangguran (X1) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y) di Kabupaten Luwu Utara**

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini telah ditemukan adanya bukti bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Hal ini berarti semakin tinggi pengangguran maka PDRB akan menurun. Pengangguran tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi suatu daerah mengalami pertumbuhan dengan laju positif dan terjadi secara terus menerus, maka artinya bahwa masyarakat mengalami peningkatan pendapatan yang bisa dipicu oleh banyaknya lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat menyebabkan laju nilai pengangguran berkurang. Yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat dapat menjadi faktor pengurang pengangguran. Sebaliknya, jika pengangguran bertambah maka akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Baeti (2013) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz Septiani, dkk (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Devi Andriani,

Nurmauliza (2018) hasil penelitiannya membuktikan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan penelitian Fatmi Ratna Ningsih (2010) pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **4.4.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (X2) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y) di Kabupaten Luwu Utara**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB (Y). Hal ini berarti semakin tinggi pengeluaran pemerintah maka PDRB akan menurun.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Wagner yang mengemukakan mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase terhadap PDB. Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Dan Musgrave bersama Rostow menyatakan perkembangan pengeluaran daerah sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah dianggap membawa pengaruh positif terhadap PDRB.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB Kabupaten Luwu Utara mengindikasikan bahwa pemerintah sebagai pemangku kebijakan haruslah memperhatikan anggaran yang akan dikeluarkan sehingga pengeluaran pemerintah

akan tepat sasaran dan dapat menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan PDRB Kabupaten Luwu Utara.

Tingkat signifikansi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah Kabupaten Luwu Utara berpengaruh negatif dan tidak signifikan bagi Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha. Secara tindakan, pemerintah dalam mengelola anggaran untuk pengeluaran pemerintah masih tidak tepat sasaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khiyati Zam Zam (2016) dan Devi Anvi Andriyani, Nurmauliza (2018) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz Septiani, dkk (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dian Fristia Alfiyanto (2014) hasil penelitiannya bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ichwan Fuady Falahinur (2017) pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfatul Karomah (2017) dan Edi Setyawan (2017) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.



#### **4.4.3 Pengaruh Jumlah Penduduk (X3) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y) di Kabupaten Luwu Utara**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB (Y). Hal ini berarti penambahan jumlah penduduk maka PDRB akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Adam Smith yang mengemukakan mengenai adanya penambahan penduduk akan berdampak pada meluasnya pasar serta mendorong spesialisasi sehingga akan menjadi faktor pendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian. Munculnya spesialisasi membantu produktivitas pekerja meningkat dan kemajuan teknologi ikut terdorong hingga pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa penduduk menjadi salah satu faktor ekonomi yang memiliki atau menduduki posisi strategis dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya jumlah penduduk berarti menghasilkan tenaga kerja yang bisa membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat signifikansi jumlah penduduk terhadap PDRB menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara memberi pengaruh yang positif bagi Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha. Keluarga Berencana (KB) yang dianggap sebagai salah satu cara menekan angka kelahiran agar jumlah penduduk dapat dikendalikan mampu menjaga kestabilan

perekonomian. Tetapi hasil penelitian yang telah dilakukan rupanya tidak sejalan dengan asumsi tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrian Safitr, Aliasuddin (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dian Fristia Alfiyanto (2014) hasil penelitiannya membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Christiawan Eka, dkk (2015) jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Nur Hidayah (2016), Khilyati Zam Zam (2016), dan Kuswati Indra Rahayu, dkk (2017) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Agustina, dkk (2018) dan Ichwan Fuady Falahinur (2017)) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan penelitian tentang “pengaruh pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Luwu Utara.
2. Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Luwu Utara.
3. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Luwu Utara.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan data-data yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan pengangguran di Kabupaten Luwu Utara. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara diharapkan bangkit kembali setelah banjir bandang yang terjadi Senin, 13 Juli 2020 lalu dan memperbaiki sarana dan prasarana serta merata. Kabupaten Luwu Utara kaya akan sumber daya

alam diharapkan dikelola dengan sebaik mungkin sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, yang tertarik meneliti masalah yang sama diharapkan untuk tidak hanya berfokus pada variabel-variabel dalam penelitian ini dan dengan skala yang lebih luas.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afiat, M. Nur. 2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-Unhalu: Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Perubahan Struktur Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara* 16: 20-26.
- Agustina, Eka., Mohd. N. Syechalad, dan A.Hamzah. 2018. *Pengaruh Jumlah Penduduk, tingkat Pengangguran dan Tingkat pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh* 4 (2): 265-283.
- Alfiyanto, D. F. 2014. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Grobogan Tahun 1990-2012*. Surakarta.
- Andriani, Devi, Nurmauliza. 2018. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal: Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007-2016* 1 (1): 8-14.
- Anggraeni, Merlin. 2017. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian terhadap Pertumbuhan ekonomi Indonesia Periode 1970-2015*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Pembangunan*. Edisi keempat. Yogyakarta. STIE YKPN.
- Baeti, Nur. 2013. *Economics Development Analysis Journal: Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011* 2 (3): 85-98.
- Christiawan Eka Arianto, Sonny Sumarsono, M. Adenan, 2015. *Pengaruh Jumlah Penduduk dan Angka Pengangguran terhadap Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember*.
- Dumairy.1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Falahinur, I. Fuady. 2017. *Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (studi kasus di kabupaten Kulonprogo tahun 1987-2016)*. Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hidayah, E. Nur. 2016. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Daya Tarik Wisata, Tenaga kerja dan UMK terhadap Pertumbuhan*

Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Karomah, U. 2017. Pertumbuhan ekonomi Dipengaruhi Pengeluaran Pemerintah dan Dana Alokasi Umum (studi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat dan Banten).

Rahayu, K. Indra, Michael, dan S. Amalia, 2017. *Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi serta Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi (studi pada provinsi Kalimantan Timur)* 13 (1): 29-49.

Rahmatullah, 2015. *Pengaruh Penduduk Umur Produktif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia* 6 (2): 68-87.

Rochaida, E. 2016. *Dampak Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur* 18 (1): 14-24.

Safitri, I. Aliasuddin. 2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Pengaruh Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi* 1 (1): 56-65.

Septiani, A., Mawardi, dan M. A. K. Rizki. 2016. *I-Economic: Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* 2 (1): 50-65.

Silvia, E. Desnim, dkk. 2013. *Jurnal Kajian Ekonomi: Analisis Pertumbuhan ekonomi, Investasi, dan Inflasi di Indonesia* 1 (2): 224.

Sunusi, D. K., A. Kumenaung, dan D. Rotinsulu. 2014. *Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010* 14 (2): 120-137.

Zam, K. Z. 2016. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Angkatan Kerja, dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Solo Raya Periode 2000-2014. Skripsi.* Ekonomi Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.